

**EFEKTIVITAS PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) DI  
KANTOR BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas  
Negeri Padang Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**OKTA VERA ASHARI**  
2012/1205827

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman  
Nama : Okta Vera Ashari  
NIM : 1205827  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Februari 2016

Disetujui Oleh:

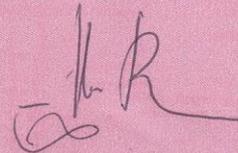
Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D

NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II



Nora Eka Putri, S.IP, M.Si

NIP. 19850312 200812 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

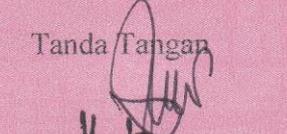
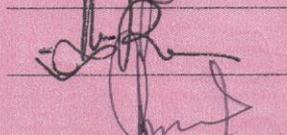
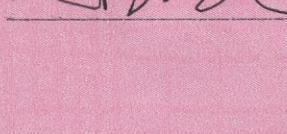
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2016 pukul 10.00-12.00 WIB

### Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman

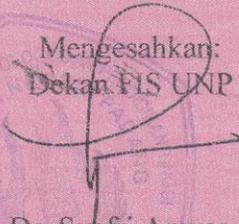
Nama : Okta Vera Ashari  
NIM/TM : 1205827/2012  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

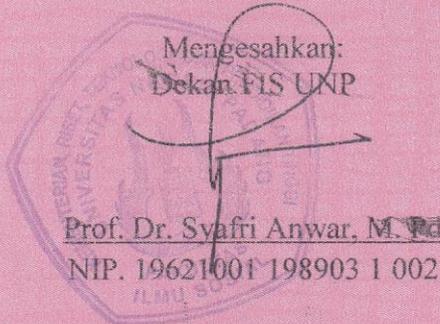
Padang, 09 Februari 2016

#### Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	
Sekretaris	: Nora Eka Putri, S.IP,M.Si	
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

  
Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd  
NIP. 196210011989031002



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Vera Ashari  
NIM/TM : 1205827/2012  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Alai / 09 Oktober 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman” adalah benar merupakan hasil karya asli saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2016

Yang Membuat Pernyataan,



OKTA VERA ASHARI  
1205827/2012

## ABSTRAK

### **OKTA VERA ASHARI (1205827/2012) Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman**

Pengolahan Data Elektronik (PDE) merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk penyediaan informasi yang menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil olahan tersebut. Pengolahan Data Elektronik (PDE) dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang canggih yang menuntut pemerintah untuk dinamis mengikuti perkembangan zaman, salah satu langkah yang diambil yaitu dengan implementasi E-government yaitu dengan melakukan pengolahan data elektronik, salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman, namun tentu saja masih banyak kendala, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengolahan data elektronik, apa kendala serta bagaimana langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/ teknik *purposive* sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Pengolahan Data Elektronik (PDE) di kantor bupati Kabupaten Padang Pariaman belum dapat dikatakan efektif hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi dan belum dapatnya dipenuhi kriteria-kriteria efektifnya suatu program. (2)Terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Pengolahan Data Elektronik (PDE) tersebut diantaranya terkait keterbatasan sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana, kondisi geografis yang tidak mendukung, belum tersedianya sistem dan prosedur kerja, keterbatasan anggaran. (3)Adapun langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain terkait dengan SDM dengan pelatihan-pelatihan, sedangkan untuk sarana prasarana salah satu yang dilakukan adalah dengan menyewa perangkat.

**Kata Kunci :** *Pengolahan Data Elektronik, Efektivitas*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D, bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D , bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik, dan Pegawai bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) SETDA Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Padang Pariaman yang telah bersedia diwawancarai
6. Teristimewa buat orang tuaku Bapak Tohar dan Ibu Asma serta kakak-kakak yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	9
1. Efektivitas .....	9
2. Pengolahan data elektronik .....	17
3. Efektivitas pengolahan data elektronik .....	26
B. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36

C. Informan Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Instrumen Penelitian .....	40
F. Uji Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Temuan umum .....	43
2. Temuan khusus .....	51
B. Pembahasan .....	76
1. Efektivitas pengolahan data elektronik .....	76
2. Kendala dalam efektivitas pengolahan data elektronik di kantor bupati kabupaten padang pariaman.....	87
3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan efektivitas pengolahan data elektronik di kantor bupati kabupaten padang pariaman ..	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	101
<b>LAMPIRAN</b> .....	104

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Model-model efektivitas .....	16
Tabel 2. Informan penelitian .....	37
Tabel 3. Daftar anggaran pembiayaan TIK lima tahun terakhir .....	73

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka konseptual .....	35
Gambar 2. Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman .....	46
Gambar 3. Halaman depan website Kabupaten Padang Pariaman 1 .....	58
Gambar 4. Halaman depan website Kabupaten Padang Pariaman 2.....	58
Gambar 5. Halaman depan website Kabupaten Padang Pariaman 3.....	59
Gambar 6. Halaman depan website BAPPEDA Kabupaten Padang Pariaman 1 .....	60
Gambar 7. Halaman depan website BAPPEDA Kabupaten Padang Pariaman 2 .....	61
Gambar 8. Halaman depan SIMGAKIN .....	61
Gambar 9. Website Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.....	63
Gambar 10. Website dinas kependudukan dan pencatatan sipil.....	65
Gambar 11. Website Humas SETDA Kabupaten Padang Pariaman.....	65
Gambar 12. Website kecamatan patamuan Kabupaten Padang Pariaman .....	66
Gambar 13. Tool Monitoring Dan Mangement Jaringan .....	68
Gambar 14. Ruang server .....	69
Gambar 15. Network Infrastruktur .....	70
Gambar 16. Kondisi geografis kantor bupati kabupaten padang pariaman....	72
Gambar 17. Proses pengolahan data elektronik di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman .....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Panduan Wawancara

Lampiran 2 Informan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian FIS UNP

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian KESBANGPOL

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang kian pesat menuntut pemerintahan baik ditingkat nasional maupun daerah untuk bergerak dinamis mengikuti perkembangan teknologi tersebut dalam rangka perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik terutama menyangkut program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya dengan menerapkan pemerintah yang berbasis elektronik yang lebih dikenal dengan *Elektronik Government* (e-government).

*E-government* secara umum dapat diartikan sebagai pengaplikasian teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi antar pemerintah, dari pemerintah ke masyarakat, pegawai, mitra bisnis atau badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Pengembangan *e-governmet* baik ditingkat nasional maupun daerah mulai di gerakkan atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Governmet* yang selanjutnya dalam rangka mengembangkan *e-government* maka pemerintah menuangkannya dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang pelaksanaannya diimplementasikan dalam sembilan program percepatan reformasi birokrasi diantaranya sistem pemerintah yang berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai *e-government* tersebut (sumber: *menpan.go.id*).

*E-government* merupakan bagian dalam Sistem Informasi Manajemen. Implementasi *e-government* dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) organisasi pemerintah digunakan sebagai alat untuk melakukan pengelolaan layanan di lingkungan pemerintah. Selain digunakan untuk keperluan internal, sistem informasi bisa digunakan sebagai sarana penyebaran informasi bagi publik yaitu dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan juga memberikan masyarakat akses informasi dan layanan pemerintah dengan lebih mudah dan nyaman, dan juga memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga dan proses demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang dibagi dalam Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Kumorotomo,W & Margono,SA (1998:224) upaya yang dilakukan untuk pengembangan SIMDA adalah dengan membentuk satuan-satuan pengolahan data dan informasi di Departemen Dalam Negeri. Beberapa tahun terakhir telah diupayakan untuk merintis terbentuknya satuan-satuan penting untuk mengembangkan SIMDA diantaranya pusat Pengolahan Data Elektronik (PDE) di daerah dan pusat Pengelola Data Fungsional (PDF) salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdirinya Pengolahan Data Elektronik (PDE) yang terpusat di Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Padang Pariaman tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan salah satu amanat tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik pasal 3, selain itu juga bertujuan mendorong perubahan budaya dan etos kerja birokrasi. Selain itu Pengolahan Data Elektronik (PDE) juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, sarana promosi dan investasi, serta pelaporan rutin (*double control*).

Pembentukan Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kabupaten Padang Pariaman diawali pada tahun 2009 yaitu dimulainya koneksi jaringan komputer dan integrasi sistem pada kompleks perkantoran Sekretariat Daerah (SEKDA), yang terpusat di bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE), selanjutnya tahun 2010 /2011 dimulai koneksi jaringan komputer dan internet di setiap kantor Dinas/Satuan kerja di luar Sekretariat Daerah (SEKDA) dan 15 titik kecamatan untuk mendukung KTP online dan tahun 2011/2012 semua Dinas/Satker dan 17 kecamatan terkoneksi jaringan online dan beberapa fasilitas umum lainnya. Desain jaringan, aplikasi, pengolahan data dan perawatan (*maintenance*) seluruhnya dilaksanakan oleh tim teknis bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) Padang Pariaman bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah salah satunya PT. Telkom.

Pengolahan Data Elektronik (PDE) tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimana ini sejalan dengan kebijakan implementasi *e-government* Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu implementasi ini juga didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang didalamnya terdapat 25 urusan wajib (antara lain urusan Komunikasi dan Informatika) dan juga 8 urusan pilihan.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Intruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *Electronic Government*
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktursl Sekretariat Deaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik tentu saja tidak lepas dari kendala. Di Sumatra Barat sendiri penerapan pemerintah yang berbasis elektronik belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa situs pemerintah resmi yang berdomain go.id masih banyak yang tidak *update*.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tentu juga memiliki kendala. Untuk pelaksanaan Pengolahan Data Elektronik (PDE) sendiri di Kabupaten Padang Pariaman belum dalam bentuk organisasi pemerintahan yang mandiri atau dalam bentuk kantor/badan, namun masih berada dalam organisasi Sekretariat Daerah (SETDA), yang pada awalnya merupakan bagian dari asisten administrasi perekonomian dan pembangunan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun

2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan di bawah Asisten Administrasi Umum, sebagaimana Keputusan Menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di lingkungan Instansi Pemerintah yang salah satunya menetapkan bahwasanya untuk instansi yang belum memiliki unit organisasi dalam mengelola, merawat sistem data dan jaringan, disarankan untuk membentuk unit organisasi yang mengelola sistem perkantoran elektronik.

Dukungan teknologi yang canggih ternyata tidak serta merta dapat mengubah budaya organisasi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, data awal yang peneliti dapatkan pada kuliah lapangan Sistem Informasi Manajemen pada tanggal 27 November 2014 di kantor Bupati Padang Pariaman oleh Roza Suhendra staff bagian Pengolahan Data Elektronik mengungkapkan bahwa kendala utama antara lain kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) disamping adanya kendala terhadap keberlanjutan program dari Pengolahan Data Elektronik (PDE) sendiri karena ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Hal tersebut dikarenakan lingkungan kompleks perkantoran yang baru dibuka dan berada di area perbukitan sehingga kondisi tersebut seringkali menyebabkan kerusakan jaringan dan juga mengganggu pasokan listrik yang mendukung kinerja dari sistem yang ada di Pengolahan Data Elektronik (PDE). Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya permasalahan SDM ini bukan hanya terkait

kurangnya tenaga profesional dan ahli saja namun juga terkait dengan *mindset* pegawai yang telah terbiasa bekerja secara tradisional dan manual dan harus berubah ke serba teknologi.

Kondisi yang demikian tentu saja mempengaruhi kinerja sistem sebuah organisasi, ketika organisasi lahir dengan sistem yang bagus harusnya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga organisasi dapat berjalan sesuai tujuan. Dukungan sistem yang canggih tidak ada artinya tanpa dukungan sumber daya manusia, karna pada hakikatnya tujuan penggunaan dari teknologi adalah untuk memudahkan pelaksanaan tugas malah akan mempersulit, maka dari itu perubahan budaya organisasi juga diperlukan agar terwujudnya efektivitas organisasi tersebut. Sebagai langkah awal dari perubahan budaya kerja adalah dengan merubah *mindset* dari sumber daya tersebut agar dapat merubah pola pikir dari konvensional ke modern agar sistem yang disediakan oleh organisasi menjadi efektif.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Belum maksimalnya implementasi sistem pemerintahan elektronik (*e-governement*) di Sumatera Barat.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola sistem Pengolahan Data Elektronik (PDE) Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pola pikir pegawai yang belum bisa menerima perubahan budaya kerja secara manual atau tradisional ke arah yang berbasis teknologi.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Kondisi lingkungan alam yang kurang mendukung sehingga sering terjadi gangguan pada sistem.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi masalah terkait dengan Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kantor Bupati Kabupaten Padang Padang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) di kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam Efektivitas Pengolahan Data Elektronik?
3. Apa langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang menghambat efektivitas Pengolahan Data Elektronik?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE)

2. Untuk menjelaskan kendala dalam efektivitas Pengolahan Data Elektronik
3. Untuk menjelaskan langkah yang diambil dalam mengatasi kendala Efektivitas Pengolahan Data Elektronik

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritik

Bermanfaat dalam pengembangan matakuliah program studi administrasi negara dalam hal ini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM), *Electronic Government* (e-Gov) dan birokrasi.

2. Secara praktik

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk PDE yang lebih baik lagi.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Efektivitas**

##### **a. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil. Menurut Robbins dalam Tika (2010:129) mendefinisikan “efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang”. Senada dengan hal tersebut menurut A.F Stoner dalam Nawawi (2013:190) mengartikan “efektivitas dengan kemampuan menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai”.

Selanjutnya menurut Salam (2004:112) “konsep keefektifan dipergunakan untuk merujuk kepada derajat pencapaian organisasi”. Sedangkan menurut Akdon (2011:70) “keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai”.

Selanjutnya berdasarkan pendapat para ahli tersebut terlihat bawasanya pada intinya efektivitas merupakan tingkat pencapaian terhadap tujuan dari organisasi itu sendiri yang telah ditentukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, demikian juga halnya dengan PDE tentu ada tujuan-tujuan yang akan dicapai.

##### **b. Indikator Efektivitas**

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya diukur dengan seberapa efektif organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Sutrisno (2011:123) “keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dalam konsep efektivitas”.

Untuk mengukur efektivitas sendiri menurut Richard M. Steerrs dalam Nawawi (2013:191) ada 2 pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu:

1) Pendekatan efektivitas yang univariasi

Maksudnya disini adalah terpenuhinya kriteria akhir dengan kerangka acuan yang tunggal dan memusatkan pada salah satu dimensi ataupun kriteria tertentu yang bersifat evaluatif

2) Pendekatan efektivitas yang multivariasi

Maksudnya adalah ukuran efektivitas yang dengan menggunakan kriteria-kriteria secara serempak, artinya terdiri dari beberapa faktor tertentu.

Efektivitas tidak hanya sekedar pencapaian organisasi namun juga keseluruhan dari proses tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Steerrs dalam Sutrisno (2011: 133) mengungkapkan bahwa pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi yaitu laba dan mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan proses yaitu sumber daya manusia.

Lebih lanjut dijelaskan Sutrisno (2011:125) bahwasanya ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (1) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi (2) karakteristik lingkungan termasuk interen dan eksteren (3) karakteristik karyawan (4) kebijakan praktik manajemen.

Dari 4 kelompok variabel tersebut terlihat bahwa adanya pengaruh teknologi dan sumber daya manusia dalam menciptakan keefektifan dalam organisasi. Begitu juga halnya dengan Pengolahan Data Elektronik (PDE), dukungan teknologi yang canggih saja tidak cukup namun harus ada dukungan SDM yang memadai dan keduanya tidak dapat dipisahkan.

Terkait dengan sumber daya manusia menurut Streers (1980:2) “dalam hal penelitian efektivitas organisasi sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai fokus utama”. Sejalan dengan hal tersebut juga menurut Puno & Atty Farolan dalam Salam (2004:22–23) bahwasanya untuk berjalannya organisasi dengan efektif dipengaruhi oleh tiga hal yaitu E V R yakni *Environment* (lingkungan), *Values* (nilai), dan *Resources* (Sumber daya) selanjutnya dalam pengelolaannya dipengaruhi oleh kecakapan dan keterampilan sumber daya manusia organisasi dalam menemukan dan menentukan nilai baru.

Dari pendapat ahli tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia adalah hal yang pokok karena meskipun suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor namun tetap saja yang menjadi pengelolanya adalah manusia. Untuk itu perlu adanya pola pikir yang terbuka dalam menjalankan organisasi karna perkembangan zaman semakin modern dan menuntut adanya perubahan *mindset* menuju *mindset global* yang mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Salam (2004:20) “karakteristik dan nilai *mindset global* merupakan kemampuan SDM mengkonseptualisasikan kekuatan geopolitik dan budaya yang kompleks serta dampaknya terhadap tujuan organisasi sendiri”. Dapat

diartikan bawasanya bagaimana seseorang tersebut memanfaatkan kekuatan politik sesuai dengan kondisi daerah untuk pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Campbell dalam Sutrisno (2010: 131-133) ada 19 butir untuk mengukur efektivitas yaitu: efektivitas keseluruhan, kualitas, kesiap siagaan, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran dan keluar masuknya karyawan, absenteisme, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan organisasi, konflik kohesi, fleksibilitas adaptasi, penilaian pihak luar, iklim, kualitas kehidupan kerja.

Sedangkan Menurut P. Siagian dalam Pradikta (2014: 6-7), suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif dengan menggunakan ukuran sebagai berikut:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Proses pencapaian tujuan akan lebih lancar, tertib dan efektif bila adanya kesadaran dan keyakinan bahwasanya tercapainya tujuan sebuah program pada dasarnya juga tujuan pribadi-pribadi dari pelaksana tersebut.

2) Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak maka pelaksana tidak atau kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

3) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, dengan ciri-ciri:

- a) Pengawasan dan pengendalian lebih menekankan pada usaha yang bersifat preventif ketimbang yang bersifat represif.

- b) Pengawasan dan pengendalian tidak mencari “siapa yang salah” tapi hal-hal yang perlu disempurnakan dalam sistem kerja organisasi.
- c) Jika terjadi penyimpangan, tindakan korektif yang hendak dilakukan seharusnya bersifat edukatif dan sepanjang masih dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Obyektifitas dalam melakukan setiap pengawasan dan pengendalian hanya dapat dipertahankan apabila standar, prosedur kerja, dan kriteria prestasi jelas diketahui baik oleh yang diawasi maupun yang diawasi.
- e) Pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dan obyektif tidak berarti bahwa tindakan indiscipliner tidak diambil tindakan.

4) Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Jelasnya tujuan, tepatnya strategi, efektifnya proses, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana dalam program dan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

- 5) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 6) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 7) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- 8) Kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang, dimana efektivitas dilihat dari sejauh mana organisasi itu mampu untuk:
  - a) Memperkirakan keadaan yang dihadapi.
  - b) Mengambil keputusan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti.
  - c) Meningkatkan unsur orientasi masa depan.

- d) Memperhitungkan faktor pembatas yang diduga akan dihadapi dalam berbagai sendi kehidupan organisasi.
- e) Memperhitungkan situasi lingkungan yang akan timbul.

Menurut Nawawi (2013:187) “salah satu tujuan reformasi organisasi publik yang utama adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya”. Reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan kondisi birokrasi kearah yang lebih baik dengan tujuan akhir tidak lain adalah pelayanan terhadap kebutuhan publik. Menurut Salam (2004:112) “jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka keefektifan itu merujuk kepada sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal, prima kepada masyarakat”.

#### c. Model-model Efektivitas

Menurut Sutrisno (2010:151-156) ada beberapa model efektivitas organisasi yang dapat di bandingkan yaitu: Model Tujuan (*Goal Model*), Model Sumber Daya Sistem, *Multiple Constituency Models* , *The Competing Valuees Models*, model proses internal, model legitimasi, model ketidak efektifan.

##### 1) Model Tujuan

Efektivitas dinilai dalam bentuk capaian akhir bukan prosesnya karena suatu organisasi diciptakan dan dirancang secara sengaja untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditentukan.

##### 2) Model Sumber Daya Sistem

Menekankan pandangan tentang organisasi sebagai struktur sosial yang memiliki hubungan antara organisasi dan lingkungan. Ada hubungan yang jelas antara sumber daya dengan keluaran organisasi.

### 3) *Multiple Constituence models*

Didasarkan pada prefensi *stake holder* yang berbeda terhadap kinerja organisasi dimana yang utama disini adalah pemenuhan kepuasan berbagai pihak.

Terdiri atas empat model:

- a) Relativistik: seperangkat pernyataan, masing-masing mencerminkan kriteria penilaian setiap pihak yang terlibat dan berbeda-beda.
- b) Perspektif Kekuasaan: efektif adalah dengan dapat memuaskan anggota dominan sebagai upaya untuk memberikan dukungan dalam menjamin kelangsungan organisasi.
- c) Perspektif keadilan sosial: dinilai efektif apabila mampu meminimumkan kekecewaan anggota terhadap konsekuensi yang diterima.
- d) Perspektif Evolusi: efektif dinilai dari proses seleksi dan evolusi masyarakat dimana kinerja yang efektif merupakan cerminan kemampuan adaptasi organisasi di lingkungan.

### 4) *The Compating values Model*

Didasarkan pada anggapan bahwa individu-individu menilai efektivitas organisasional dengan membuat *trade off* antara tiga dimensi yang umum yaitu: fokus organisasional (tugas orang), struktur organisasional (kendali-fleksibilitas) dan hubungan prasarana dan hasil akhir organisasional (proses keluaran).

### 5) Model Proses Internal

Didasarkan pada bawasanya para individu harus mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, mempertahankan integritas, dan keunikan mereka dalam tatanan organisasi.

## 6) Model Legitimasi

Beranggapan bahwa kelangsungan organisasi merupakan tujuan utama, cocok digunakan untuk menganalisis organisasi ditingkat makro yaitu penentuan organisasi mana yang selamat, menurun ataupun mati.

## 7) Model Ketidak-efektifan.

Memusatkan pada faktor-faktor yang menghambat suksesnya kinerja organisasi, bukan faktor-faktor yang menyumbang pada keberhasilan dimana adanya kesalahan dalam mengidentifikasi kriteria efektivitas, yaitu hasil akhir yang diinginkan.

**Tabel 1**  
**Model-model efektivitas**

<b>Model</b>	<b>Definisi</b> <i>Sebuah organisasi adalah efektif bila...</i>	<b>Kapan Berguna</b> <i>Model paling terapan bila...</i>
Model Tujuan	Mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan	Tujuan-tujuan jelas, konseptual, berjangka waktu, dan dapat diukur
Model Sumberdaya Sistem	Mampu memperoleh sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan.	Ada kaitan yang jelas antara masukan dan kinerja
Model Proses Internal	Tidak mempunyai hambatan internal dan fungsi-fungsi internal berjalan lancar.	Ada kaitan yang jelas antara berbagai proses organisasional dan kinerja
Multiple constituency model	Semua pihak terkait terpenuhi paling tidak secara minimal	Pihak-pihak terkait mempunyai pengaruh kuat terhadap organisasi dan harus dipenuhi permintaannya
Competing values model	Memenuhi preferensi pihak-pihak terkait dalam hal empat kuadran yang berbeda	Organisasi tidak jelas tentang kriterianya sendiri, atau kriteria berubah setiap waktu
Model Legitimasi	Kelangsungan hidupnya terjamin sebagai hasil pelaksanaan kegiatan <i>legitimate</i> .	Kelangsungan hidup atau penurunan dan kematian organisasi adalah penting.
Model Ketidak-efektifan	Tidak mempunyai kelemahan-kelemahan atau sifat-sifat sumber ketidak efektifan.	Kriteria efektivitas tidak jelas atau berbagai strategi perbaikan diperlukan.

*Sumber: model-model efektivitas menurut Cameron dalam Susanto(2004:312)*

## **2. Pengolahan Data Elektronik**

Menurut Sutabri (2005:16) data merupakan kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Lebih lanjut dijelaskan Sutabri (2005:21) biasanya pengolahan data terdiri dari kegiatan–kegiatan penyimpanan data dan penanganan data.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal (1) ayat (5) menyebutkan bahwa “sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik”. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal (1) ayat (6) biasanya penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara, orang, badan/usaha, dan/atau masyarakat.

Menurut Siagian (2003:80) “pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk penyediaan Informasi yang menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil olahan tersebut”. Terkait dengan penyediaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 9 ayat (2) yaitu :

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau.
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait dengan kualitas dari informasi menurut Sutabri (2005: 35-36) kualitas suatu informasi tergantung dari 3 (tiga) hal yaitu, informasi harus akurat (*accurate*), tepat waktu (*timelines*) dan relevan (*relevance*).

a. Akurat (*accurate*)

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.

b. Tepat waktu (*timelines*)

Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan, bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi.

c. Relevan (*relevance*)

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan yang lain berbeda.

Dalam penyediaan informasi tersebut dalam hal publikasi dibutuhkan sebuah sistem informasi menurut Sutabri (2005: 31) sistem informasi adalah sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi dengan laporan yang diperlukan.

Lebih lanjut menurut Siagian (2003:98-101) bahwasanya ada lima komponen utama sistem Pengolahan Data Elektronik yaitu: sumber daya manusia, prosedur, infrastruktur fisik, perangkat keras, dan perangkat lunak.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan *resource* yang paling strategis. keseluruhan dari dari komponen sistem sangat tergantung kepada unsur manusia yang memanfaatkan dan menggunakannya.

b. Prosedur kerja

Prosedur kerja perlu ditaati oleh semua pihak yang terlibat dan merupakan instrumen untuk menjamin bawasanya keseluruhan data diselenggarakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Adapun prosedur kerja yang menentukan dalam pengolahan data yaitu: 1) tata cara identifikasi sumber data, 2) cara penyiapan data 3) pengoperasian dan pemeliharaan perangkat keras, 4) pengendalian kualitas luaran (*output*), 5) pendistribusian informasi, 6) cara perbaikan kesalahan, 7) cara pemeliharaan keamanan data dan informasi.

Pemahaman dan ketaatan terhadap prosedur kerja tidak hanya berlaku bagi mereka yang bertugas mengolah data, akan tetapi juga bagi sumber data dan para pengguna informasi yang dihasilkan.

c. Infrastruktur Fisik

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada sarana dan prasarana fisik yang diperlukan. Jika suatu organisasi pengolahan data menggunakan satu komputer besar sebagai komputer pusat (*mainframe*), diperlukan ruangan komputer khusus. Selain itu ruang komputer harus memenuhi berbagai persyaratan dan menjadi kawasan yang terbatas, suhu yang terkendali,

terjaminnya suplai listrik yang tidak terganggu misalnya dengan memiliki generator sendiri sehingga suplai listrik tidak terganggu.

#### d. Perangkat Keras

Adapun komponen yang merupakan perangkat keras yaitu:

- 1) Unit pemrosesan sentral (*central processing unit*) yang merupakan inti komputer yang peranannya sebagai pelaksana intruksi dalam bentuk program dengan menggunakan bahasa komputer.
- 2) Alat-alat pemasukan data yang mengirimkan data dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Alat-alat tersebut antarlain: papan ketik (*keyboard*), kursor (*mouse*), dll.
- 3) Alat-alat iuaran yang merupakan berbagai perlengkapan yang berperan membuat informasi. Alat-alat tersebut antara lain: *tape drive*, *disket*, printer, dll.
- 4) Alat penyimpanan tambahan atau pendukung yaitu *disk* baik berupa *hard disk* maupun *floppy disk*, *flash disk*, dll.

#### e. Perangkat Lunak.

Perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan program merupakan intruksi yang diberikan oleh operator komputer kepada komputer yang memungkinkan komputer mengerjakan yang diinginkan bagi *programmer*. adapun fungsi perangkat lunak antara lain: mengelola berbagai sumber daya komputer yang dimiliki oleh perusahaan, mengembangkan berbagai sarana yang digunakan oleh sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pemanfaatan yang optimal, dan menjembatani peran informasi sebagai hasil olahan data dengan penggunaannya.

Sedangkan dalam sistem informasi Stair dalam Anwar Oetodjo (2004: 41) menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis komputer (CBIS) dalam suatu organisasi terdiri dari komponen *hardware*, *software*, *database*, telekomunikasi, manusia dan prosedur.

- 1) *Hardware*, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukan data, memproses data dan keluaran data.
- 2) *Software*, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer.
- 3) *Database*, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi.
- 4) Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan data yang efektif.
- 5) Manusia, yaitu personil dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, *programer*, *operator* dan bertanggung jawab terhadap perawatan sistem.
- 6) Prosedur yakni tata cara yang meliputi strategi, kebijakan, metode dan peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer.

Menurut Sutabri (2005:27-28) menyebutkan bahwa dalam beberapa organisasi biaya pengolahan data untuk menghasilkan informasi tingkat tinggi berkisar 5 sampai 15% dan dalam organisasi tertentu mencapai 50% yang terdiri atas hal tersebut tentu merupakan suatu kebutuhan anggaran yang tinggi. Terkait dengan pengadaan perangkat sistem informasi dengan kebutuhan organisasi publik yang besar dan biaya pengadaan yang mahal menurut Kumorotomo &

Margono (1998 :115-121) alternatif pengadaan perangkat keras atau perangkat lunak adalah sebagai berikut:

1) Membeli/memiliki sendiri.

Kebijakan membeli harus benar-benar diperhitungkan secara matang karena tingkat keusangan yang sangat cepat, dan beberapa bulan berikutnya akan muncul terobosan baru yang lebih canggih.

2) Menyewa (*renting*)

Penyewaan perangkat kepada perusahaan merupakan alternatif yang lebih murah dalam jangka pendek tapi bisa jauh lebih mahal jika penyewaan dilakukan dalam waktu panjang.

3) Sewa-beli (*leasing*)

Merupakan perjanjian kontrak untuk mendapatkan hak pemakaian komputer untuk satu periode tertentu.

4) Bagi-waktu (*time-sharing*)

Merupakan penggunaan mesin komputer atau program aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa organisasi.

5) Membeli jasa pusat pengolahan data (data processing center)

Cara ini dapat dilakukan dengan organisasi menyerahkan bahan data mentah kepada lembaga pengolah data kemudian memberikan ongkos atas pengolahan data tersebut.

Berdirinya Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Padang Pariaman yang terpusat di Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Padang Pariaman ini adalah dalam rangka menjalankan aktivitas daerah yang merupakan

pelaksanaan *E-Government* atau pemerintahan yang berbasis elektronik. *E-government* merupakan bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dilakukan di pemerintahan. Namun tentunya berbeda antara satuan kerja sistem informasi di organisasi swasta dan organisasi pemerintah karena organisasi swasta berorientasi pada laba sedangkan organisasi pemerintah berorientasi pada kepuasan publik. Adapun yang menjadi tujuan dari *e-government* sendiri menurut Anwar & Oetoyo (2004:126) adalah :

- 1) Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
- 2) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang berjalan saat ini.
- 3) Menunjang *good governance* dan keterbukaan.
- 4) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal tersebut sejalan juga dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanahkan tentang keterbukaan informasi bagi publik atau masyarakat banyak.

Namun terkait dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Sutabri (2005: 31) sebagian besar informasi tidak dapat persis ditafsir keuntungannya dengan suatu nilai uang namun dapat ditafsir nilai efektivitasnya.

Pembentukan Pengolahan Data Elektronik (PDE) ini merupakan upaya dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sebagaimana yang dijelaskan Kumorotomo, W & Margono, SA (1998:224) upaya yang dilakukan untuk pengembangan SIMDA adalah dengan membentuk satuan-satuan pengolahan data dan informasi di Departemen Dalam Negeri. Beberapa

tahun terakhir telah diupayakan untuk merintis terbentuknya satuan-satuan penting untuk mengembangkan SIMDA diantaranya pusat Pengolahan Data Elektronik (PDE) di daerah dan pusat Pengelola Data Fungsional (PDF).

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, menurut Anwar & Oetojo (2004:115) menjelaskan bahwasanya “organisasi-organisasi penyelenggara SIMDA biasanya dikenal dengan Kantor/Badan Pengolahan Data Elektronik (K/BPDE)”. Lebih lanjut menurut Anwar & Oetojo (2004:115) tugas pokok K/BPDE adalah melaksanakan pengolahan data dan informasi secara elektronik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau walikota.

Sebenarnya penyelenggaraan pengolahan data elektronik tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pengolahan data secara elektronik yang dilakukan di Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Padang Pariaman ini dilandasi dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang mengintruksikan kepada:

- 1) Menteri
- 2) Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen
- 3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
- 4) Panglima Tentara Nasional
- 5) Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Jaksa Agung Republik Indonesia
- 7) Gubernur
- 8) Bupati/ Walikota

Dari intruksi Presiden tersebut dapat dilihat bawasanya salah satu yang mendapatkan mandat untuk pengembangan *E-Government* adalah Bupati/Walikota, yang mana isi dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini pada intinya mengamanatkan empat hal yaitu: mengambil langkah yang diperlukan untuk pengembangan *E-Government* secara nasional, merumuskan rencana dan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, melaksanakan rencana, dan melaksanakan intruksi dengan penuh tanggung jawab. Seperti salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman yang mengembangkan *E-government*-nya dengan membentuk Pengolahan Data Elektronik (PDE).

Kabupaten Padang Pariaman membentuk pusat Pengolahan Data Elektronik yang dilakukan di Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, pada pasal 5 disebutkan susunan organisasi sekretariat daerah yang mana pada poin c disebutkan bahwasanya Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) merupakan bagian dari asisten administrasi perekonomian dan pembangunan. Dari Peraturan Daerah tersebut terlihat bahwasanya keberadaan PDE Kabupaten Padang Pariaman telah ada sejak tahun 2008.

Selanjutnya pada tahun 2011 Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) di pindahkan di bawah Asisten Administrasi Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

### **3. Efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE)**

Pengolahan Data Elektronik (PDE) merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk penyediaan Informasi yang menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil olahan tersebut, sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian terhadap tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) dapat diartikan sebagai sejauh mana Pengolahan Data Elektronik (PDE) dalam mencapai tujuannya.

Dalam mengukur Efektivitas Menurut P. Siagian dalam Pradikta (2014: 6-7), suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif dengan menggunakan ukuran yang berkaitan dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai, penyusunan program yang tepat, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, tersedianya sarana dan prasarana, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang.

Demikian juga halnya untuk melihat efektivitas yang dicapai oleh Pengolahan Data Elektronik (PDE) .

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengolahan Data Elektronik (PDE) tentunya harus di sesuaikan dengan tujuan jangka panjang maupun jangka

pendek yang akan di capai oleh Pengolahan Data Elektronik. Menurut Anwar & Oetojo (2004:115) yang menjadi tujuan jangka panjang PDE yaitu:

*Menyediakan data dan informasi dalam bentuk alfanumeris, tabulasi, grafis, georgafis, gambar bergerak, maupun dalam bentuk suara secara cepat, tepat dan akurat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan ke arah yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.*

Lebih lanjut menurut Anwar & Oetojo (2004:116) bahwasanya yang menjadi tujuan jangka pendek PDE adalah “terbentuknya pusat data, terciptanya sistem aplikasi pengolahan data secara elektronik yang terintegrasi dan baku, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai teknologi informasi”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwasanya dalam jangka panjang yang menjadi tujuan dari Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah menyediakan data dan informasi yang akurat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah yang diantaranya dalam bentuk alfanumeris (aksara yang terdiri atas huruf, angka, tanda baca, dll), tabulasi (penyajian data dalam bentuk tabel), grafis (penyajian hasil dalam bentuk grafik), georgafis, gambar bergerak, maupun dalam bentuk suara. Sedangkan dalam jangka pendek adalah pembentukan pusat data yang terintegrasi yang nantinya akan menunjang pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta SDM yang menguasai teknologi.

Terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan menghasilkan SDM yang menguasai teknologi salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan, menurut Sutabri (2005: 49) pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, pengkajian, bimbingan teknis dan kerjasama internal dan eksternal.

## 2) Penyusunan program yang tepat

Pengolahan data elektronik yang efektif memerlukan program yang tepat berupa penjabaran dari rencana-rencana sebagai pedoman bertindak dan bekerja yang harus berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Menurut Anwar & Oetoyo (2004:115) tugas pokok KPDE adalah melaksanakan pengolahan data dan informasi secara elektronik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan gubernur, bupati atau walikota. Dengan demikian pelaksanaan program pengolahan data elektronik di Kabupaten Padang Pariaman harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didalamnya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari Pengolahan Data Elektronik (PDE).

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengolahan Data Elektronik adalah: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pengelolaan Data Elektronik dan sistem informasi maupun publikasi melalui website Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan website Kabupaten Padang Pariaman diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pembuatan situs web SKPD terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya pada pada pasal (2)

dijelaskan bahwasanya bagi SKPD yang akan membuat situs web SKPD terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan alokasi ruangan hosting sebagai sub domain dari *www.padangpariamankab.go.id*

3) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sebagaimana menurut Siagian (2003:80) yang mengartikan “pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk penyediaan informasi yang menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil olahan tersebut”. Dengan demikian perlu ada pengawasan terhadap hasil pengolahan data. pengawasan yang efektif merupakan pengawasan yang bersifat mendidik, hal tersebut merujuk kepada pengawasan yang lebih mengarah kepada pengawasan yang bersifat preventif dibanding represif, dan juga mengarah kepada perbaikan sistem serta obyektif dalam melakukan pengawasan.

4) Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien

Dalam kegiatan pengolahan data yang menghasilkan informasi dengan segala kondisi sumber daya haruslah dilakukan dengan kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Menurut Anwar & Oetomo (2004:102) “pemakai utama informasi adalah manajemen, yaitu semua orang yang ada dalam organisasi yang tugas dan tanggung jawab utamanya adalah mengfungsikan organisasi dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian pelaksanaan tugas tersebut tergantung dari bagaimana sumber daya manusia yang ada di organisasi mampu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

5) Tersedianya sarana dan prasarana.

Terkait dengan tersedianya fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas dari Pengolahan Data Elektronik (PDE) tersebut yang merupakan bagian komponen dari Pengolahan Data Elektronik (PDE) yang diantaranya:

- a) Infrastruktur Fisik, contohnya terjaminnya suplai listrik yang tidak terganggu misalnya dengan memiliki generator sendiri sehingga suplai listrik tidak terganggu.
- b) Perangkat Keras, yang meliputi monitor, *CPU*, *keyboard*, *mouse*, dll
- c) Perangkat Lunak, seperti halnya aplikasi pengolahan angka, pengolahan kata, desain multimedia, dll.

Selain itu juga terkait dengan perangkat pusat data dan operasi jaringan yang berperan penting dalam menunjang Pengolahan Data Elektronik.

6) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Dalam mencapai tujuan tentu harus ada strategi yang digunakan, demikian juga halnya dengan Pengolahan Data Elektronik (PDE), untuk berjalannya pengolahan data yang efektif harus ada strategi khusus dan jelas demi tercapainya tujuan sebuah sistem ataupun organisasi secara keseluruhan.

7) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Dalam perumusan kebijakan terkait dengan segala sesuatu tentang Pengolahan Data Elektronik (PDE) harus dianalisa terlebih dahulu agar

menghasilkan kebijakan yang nantinya memang mendukung kinerja dari Pengolahan Data Elektronik (PDE) itu sendiri.

8) Kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang.

Dalam hal ini dilihat dari sejauh mana organisasi mampu memperkirakan keadaan yang akan dihadapi, mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak pasti dan berorientasi masa depan dan memperkirakan hambatan yang akan timbul, menurut Anwar & Oetojo (2004:101) “tujuan utama dalam pengambilan keputusan adalah memecahkan masalah yang dihadapi baik oleh individu, organisasi, ataupun perusahaan. Apabila keputusan tersebut dapat memecahkan masalah, berarti pengambilan keputusan yang dilakukan bersifat efektif”.

Dalam pencapaian efektivitas tersebut tentu ada kendala yang dihadapi sebagaimana Teori kendala atau *Theory Of Constraints* (TOC) yang dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenalkan dalam bukunya, *The Goal*. Dapat diartikan bahwa TOC adalah suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang dibatasi untuk meningkatkan *output*. Menurut Gusnardi (2010:337) adalah pemanfaatan keterbatasan sumber daya yang dapat menunjukkan kinerja dari suatu sistem. Manajer seharusnya tidak hanya meminimasi biaya, tetapi melainkan juga memanaj keterbatasan dalam suatu sistem.

Menurut Hansen dan Mowen dalam Styaningrum & Hamidi (2008:28) jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berdasarkan asalnya dan berdasarkan sifatnya.

1) Berdasarkan Asalnya:

- a) Kendala internal (*Internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan *throughput* semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional
- b) Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem.

2) Berdasarkan sifatnya:

- a) Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.
- b) Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Selanjutnya dalam menghadapi kendala tersebut dibutuhkan solusi. Dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan *Theory of constraint* memfokuskan pada perbaikan yang terus-menerus dengan mengelola kendala dalam suatu sistem. *Theory of Constraint* memiliki lima langkah yang harus diikuti dalam penyelesaian kendala tersebut yaitu *Identify the system's constraints, Exploit the system's constraints, Subordinate Everything to the step 2 decision, Elevate the system's constraints, Break constraint and go back to step 1* (Gusnardi 2010:339)

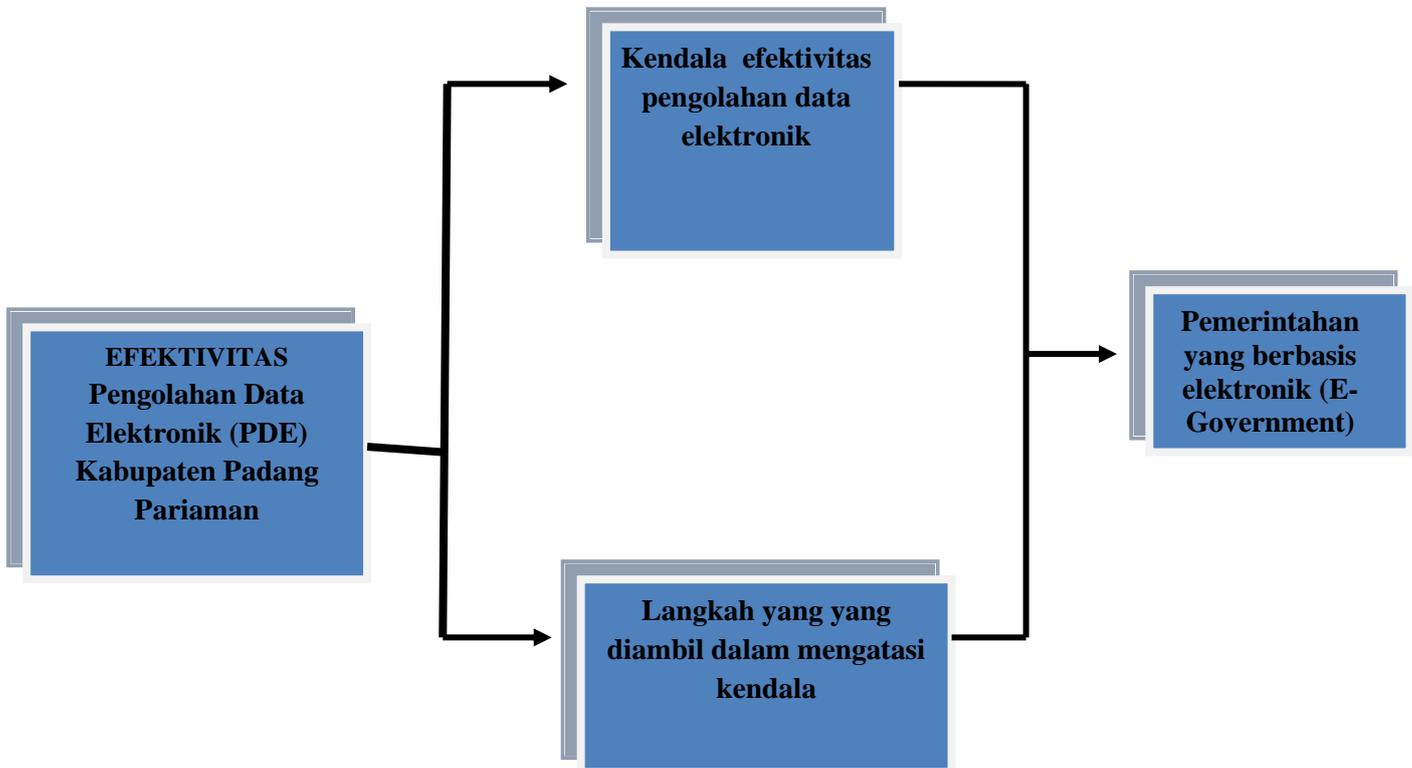
Langkah-langkah tersebut adalah :

- 1) Mengidentifikasi kendala suatu sistem (*Identify the system's constraints*)  
Mengidentifikasi bagian sistem manakah yang paling lemah kemudian melihat kelemahan fisik atau kebijakan
- 2) Eksploitasi kendala sistem (*Exploit the system's constraints*).  
Menentukan cara menghilangkan atau mengelola dan memanfaatkan kendala dengan biaya yang paling rendah.
- 3) Mengelola aliran sepanjang kendala (*Subordinate Everything to the step 2 decision*).  
Setelah menentukan kendala dan telah diputuskan bagaimana mengelola kendala tersebut maka harus mengevaluasi apakah kendala tersebut masih menjadi kendala pada performansi sistem atau tidak. Jika tidak maka menuju ke langkah kelima, tetapi jika ya maka akan menuju ke langkah keempat.
- 4) Menambah kapasitas pada kendala sistem (*Elevate the system's constraint*)  
Jika langkah ini dilakukan, maka langkah kedua dan ketiga tidak berhasil menangani kendala. Maka harus ada perubahan besar dalam sistem, seperti reorganisasi, perbaikan modal, atau modifikasi substansi sistem.
- 5) Menghentikan masalah, kembali ke langkah pertama (*Break constraint and go back to step 1*).  
Jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan maka akan mengulangi lagi dari langkah pertama. Proses ini akan berputar sebagai siklus. Tetap waspada bahwa suatu solusi dapat menimbulkan konstrain baru perlu dilakukan.

## **B. Kerangka Konseptual**

*E-government* merupakan Sistem Informasi Manajemen di pemerintahan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan mendirikan pusat Pengolahan Data Elektronik (PDE). Salah satu kabupaten yang mendirikan yaitu Kabupaten Padang Pariaman yang terpusat di Sekterariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Padang Pariaman. Namun tentu saja pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala. Untuk melihat seberapa efektif Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Kabupaten Padang Pariaman maka digunakan suatu indikator pengukuran efektivitas yaitu: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, penyusunan program yang tepat, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, tersedianya sarana dan prasarana, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang, serta apa saja yang menjadi penghambat pencapaian tujuan dan bagaimana langkah yang diambil, serta upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) tersebut sehingga dapat terlaksananya pemerintahan yang berbasis elektronik yang efektif. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam bagan kerangka konseptual:

**Gambar 1**  
**Kerangka konseptual**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data Elektronik di kantor bupati kabupaten Padang Pariaman belum dapat dikatakan efektif hal ini dikarenakan masih belum dapatnya dipenuhi kriteria-kriteria efektifnya suatu program diantaranya dilihat dari (a) segi kejelasan tujuan yang hendak dicapai, telah adanya tujuan yang jelas yang sesuai dengan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dari pengolahan data elektronik. (b) Jika dilihat dari segi penyusunan program, dilakukan secara bertahap namun belum ada cetak biru *master plan* yang dapat dijadikan acuan. (c) Dari segi pengawasan belum dapat dikatakan optimal karna masih banyaknya SKPD yang tidak update informasi dan tidak ada tindak lanjut. (d) Terkait dengan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien yang menjadi kendala utama adalah SDM dan juga jika dilihat dari efisien adalah dampaknya paling besar berupa efisiensi kerja. (e) Tersedianya sarana dan prasarana dapat dikatakan belum mencukupi baik dari segi perangkat maupun infrastruktur fisik. (f) Dari segi strategi pencapaian tujuan belum ada strategi khusus yang terstruktur dalam pengolahan data elektronik yang dilakukan. (g) Jika dilihat dari analisa perumusan kebijakan dalam hal pengolahan data elektronik belum adanya alternatif kebijakan yang dibuat. (h) selanjutnya dari segi kemampuan merumuskan perencanaan pengolahan data

elektronik dibatasi karna keberadaannya yang berada dibawah Sekretariat daerah.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kemampuan, sarana dan prasarana yang belum memadai, kondisi geografis yang kurang mendukung, ketersediaan sistem dan prosedur kerja, keterbatasan anggaran dan permasalahan koordinasi antar instansi. Jika dilihat dari asalnya dapat dibagi menjadi dua kendala yaitu kendala internal yang dapat menghambat dari dalam sistem dan kendala eksternal yang berasal dari luar sistem tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal keduanya tentunya dapat menghambat tercapainya efektivitas pengolahan data elektronik.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu keterbatasan SDM langkah yang dilakukan adalah dengan menambah SDM dan juga meningkatkan kemampuan dari SDM yang ada dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan terkait dengan teknologi informasi, dan juga untuk permasalahan perangkat yang lebih kompleks di perbantukan pada pihak ketiga. Sedangkan terkait dengan perangkat adalah dengan menyewa perangkat terkait dengan kebutuhan jangka pendek juga berbagi *server* dengan kominformasi, dan juga menyiapkan prosedur kerja yang jelas serta pembuatan rencana induk yang dijadikan prioritas ditahun 2016. Selanjutnya jika dilihat dari pemecahan kendala dalam *teori of constraints* ada lima langkah (a) mengidentifikasi kendala suatu sistem bahwasanya dalam hal pengolahan data elektronik yang menjadi kendala utama adalah SDM, (b) eksploitasi kendala

sistem dilakukan adalah bukan hanya dengan pembinaan sumber daya manusia saja namun juga dengan menambah tenaga profesional, (c) mengelola aliran sepanjang kendala dengan telah melakukan penambahan dan peningkatan sumber daya manusia maka harus dilakukan evaluasi, (d) menambah kapasitas pada kendala sistem yaitu perubahan besar dalam sistem, terkait dengan peningkatan sumber daya manusia jika tetap tidak dapat mengatasi kendala, maka yang harus dilakukan adalah dengan berbagai perubahan mendasar, salah satunya adalah reorganisasi dan berbagai penataan mendasar lainnya, (e) menghentikan masalah, kembali ke langkah pertama, jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan maka akan mengulangi lagi dari langkah pertama karena proses ini akan berputar sebagai siklus.

## **B. Saran**

Melihat kondisi pada pengolahan data elektronik di pemerintahan kabupaten padang pariaman maka penulis menyarankan :

1. Membentuk kantor pengolahan data elektronik (KPDE) agar dapat dikelola dengan baik dan dengan demikian akan dapat merencanakan dan menyusun program sendiri serta menganggarkan kebutuhan sendiri seperti halnya daerah-daerah lain yang terlebih dahulu mendirikan KPDE sehingga pelaksanaan pengolahan data elektronik dapat berjalan dengan efektif .
2. Menambah SDM yang tersedia, karna dengan jumlah SDM yang 6 orang sangat jauh dari cukup, dimana tidak adanya staff yang mengerjakan secara teknis dan semuanya dikerjakan oleh kepala subbagian dan peningkatan

kualitas SDM bukan hanya pelatihan namun dapat juga dengan program penambahan tingkat pendidikan.

3. Pembuatan prosedur kerja atau *standart operasional prosedur* (SOP) agar tidak terjadi tumpang tindih dan juga lempar tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan juga ada acuan dalam melaksanakan tugas serta akan berdampak dengan hubungan koordinasi antar instansi karna sudah ada prosedur yang jelas.
4. Menambah sarana dan prasarana dan juga melakukan perawatan secara berkala terhadap perangkat TIK yang digunakan
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan akan pentingnya Pengolahan Data Elektronik.
6. Memberikan pengawasan terhadap berjalannya aktivitas *website* SKPD karena pada dasarnya semua *website* berada dibawah *website* pemerintahan yang ditangani oleh sub bagian pengolahan data.
7. Setiap SKPD hendaknya menyediakan operator khusus yang profesional yang menangani pengolahan data elektronik sehingga pengelolaan website dan sistem informasi lainnya tidak terbengkalai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2011. *Strategic Management*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung
- Anwar, M. Khoirul & Oetojo S, Asianti. 2004. *Simda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kumorotomo, W & Margono, S A. 2001. *Sistim informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik*. Yokyakarta: Gajah Mada University press
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Z. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press
- Salam, Darma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* . Jakarta: Djambatan
- Siagian, Sondang. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Steers, RM. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Susanto, A.B, dkk. 2004. *Strategi Organisasi*. Yokyakarta: Amara Books
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yokyakarta: Penerbit Andi
- Sutrisno, E. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Pustaka Media Group
- Tika, MP. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara

### **Jurnal**

- Gusnardi. 2010. TOC: *Tinjauan Teori*. Pekbis Jurnal Vol. 2 No. 3
- Pradikta, Eggyawang Setia. 2014. *Efektivitas Program E-Performance Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Peningkatan Kinerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan, Dan Manajemen Publik, Vol. 2 No. 1 .

Setyaningrum, Rina Moestika & Hamidi, Muhammad Fauzan. 2008. *Analisis Biaya Produksi Dengan Pendekatan Theory Of Constrain Untuk Meningkatkan Laba*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang didalamnya terdapat 25 urusan wajib (antara lain urusan Komunikasi dan Informatika) dan juga 8 urusan pilihan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Intruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *Electronick Government*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13/KEP./M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Deaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

**Alamat Website**

[www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id) diakses tanggal 30 Desember 2015

[www.bappeda.padangpariamankab.go.id](http://www.bappeda.padangpariamankab.go.id) diakses tanggal 30 Desember 2015

[www.simgakin.padangpariamankab.go.id](http://www.simgakin.padangpariamankab.go.id) diakses tanggal 30 Desember 2015

[www.disdikkabpadangpariaman.org](http://www.disdikkabpadangpariaman.org) diakses tanggal 3 Januari 2016

[www.dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://www.dukcapil.padangpariamankab.go.id) diakses tanggal 3 Januari 2016

[www.humaspadangpariamankab.go.id](http://www.humaspadangpariamankab.go.id) diakses tanggal 3 Januari 2016

[www.patamuan.padangpariamankab.go.id](http://www.patamuan.padangpariamankab.go.id) diakses tanggal 3 Januari 2016

[www.simgakin.padangpariamankab.go.id](http://www.simgakin.padangpariamankab.go.id) diakses tanggal 30 Desember 2015